

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DI KECAMATAN UREI FASEI KABUPATEN WAROPEN

Getrudis Valentina Minipko

NPP. 29.1748

*Asdaf Kabupaten Waropen Provinsi Papua
Program Studi Studi Kebijakan Publik*

Email: valentinagetrudis@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Implementation of the direct cash assistance program policy for village funds in the Urei Faisei sub-district, Waropen district, which is given to the community where during this pandemic period, of course, many people experience a decrease in income and even lose their jobs. **Purpose:** The purpose of this study was to determine the implementation of the direct cash assistance program policy for village funds in Urei Faisei sub-district, Waropen district.. **Method:** This study uses a qualitative descriptive writing method. Data collection techniques in the form of observation, interviews and documentation. In writing this thesis using the theory of implementation of George Edward III which consists of four indicators, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure. **Result:** The results of this study show that the implementation of the BLT-Dana Desa program is running well and in an orderly manner. The implementation stages begin with socialization, verification of data on the distribution of BLT cards, disbursement of BLT funds, and related to the preparation of implementation reports. **Conclusion:** The implementation of the direct cash assistance program for village funds in the Urei Faisei sub-district, Waropen district, has been going well, this can be seen from the well-implemented indicators, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure. **Keywords:** Implementation, Government Policy, Direct Village Fund Cash Assistance

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Implementasi kebijakan program bantuan langsung tunai dana desa di kecamatan urei fasei kabupaten waropen, yang diberikan kepada masyarakat yang dimana dalam masa pandemi ini tentunya banyak orang mengalami penurunan pendapatan dan bahkan kehilangan pekerjaan. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan program bantuan langsung tunai dana desa di kecamatan urei fasei kabupaten waropen. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penulisan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan teori Implementasi dari George Edward III yang terdiri dari empat indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan program BLT-Dana Desa berjalan dengan baik, dan tertib. Tahapan pelaksanaan dimulai dengan sosialisasi, verifikasi data pembagian kartu BLT, pencairan dana BLT, dan terkait pembuatan

laporan pelaksanaan.. **Kesimpulan:** Implementasi kebijakan program bantuan langsung tunai dana desa di kecamatan urei faisei kabupaten waropen ini sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat terlihat dari indikator yang terlaksana dengan baik yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan Pemerintah , Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Manajemen Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK No.222 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 yaitu sumbangan uang tunai terhadap tanggungan fakir maupun tidak berkecukupan yang berpangkal dari Dana Desa untuk menyurutkan imbas ekonomi efek dari adanya pandemi covid-19. Pemerintah saat ini kembali melakukan Program Bantuan ini yakni bantuan prasyarat oleh Pemerintah pada tahun 2020 yang mengarah pada Komunitas. Pemerintah memakai satu kebijakan BLT dalam usaha menolong rakyat miskin dalam memenuhi keperluan populasi sewaktu wabah, besaran yang diterima oleh masyarakat sebesar Rp.600.000-, selama tiga bulan pertama dan bulan selanjutnya sebesar Rp. 300.000-, selama lima bulan. Manfaat dari Kebijakan ini haruslah berguna untuk memakmurkan setiap masyarakat lebih-lebih dalam masa wabah Covid 19 ini. Beragam Kebijakan dilakukan Pemerintah dalam rangka menanggulangi wabah saat ini dengan menerapkan aturan kesehatan baik dari pemerintah tingkat pusat, tingkat daerah, sampai tingkat RT dan RW yakni melalui social distancing, physical distancing, PSBB(pembatasan sosial berskala besar), PPKM(pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat seluruh wilayah jawa-bali. Bantuan dari Pemerintah pada pandemi yaitu berupa BLT-DD(Bantuan Langsung Tunai Dana Desa).

Dalam rangka pendistribusiannya Pemerintah diharapkan mampu membagikan untung khususnya di pedesaan. Bersumber pada Sertifikat Desa, Pemerintah daerah Terlambat dan migrasi local Republik Indonesia No. 8 Tahun 2020 Tentang Desa tanggap covid-19 sebagai acuan dalam dan realisasi Padat Karya Tunai Desa(PKTD) memakai Dana Desa. Maklumat Menteri Desa PDTT No. 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Surat Edaran Mendes No. 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap covid dan Penegasan Padat karya Tunai Desa. Kebijakan dari Menteri tersebut diprioritaskan dalam Penanganan Pandemi yang sedang terjadi. Pemerintah memakai Kebijakan penyaluran dalam cara menambah Rehabilitasi ekonomi masyarakat di tingkat Kampung. Program BLT merupakan bentuk program yang akan dilakukan oleh pemerintah sebagai dampak covid-19. Adapun dukungan komoditas pangan berupa beras dan telur. BLT ini tetap di dampingi oleh Program Pengentasan Kemiskinan yang sudah berjalan, yakni beras untuk rakyat miskin (raskin). Bantuan Langsung Tunai selama masa wabah ini Pemberian Sembako, Bantuan Sosial Tunai, Bebas Listrik, Kartu aktivis, Sumbangan upah pegawai dan BLT usaha mikro kecil. Khusus di Daerah Papua sendiri akibat dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat yang diterapkan Pemerintah Pendistribusian pada bulan juli sekitar Rp.83 miliar untuk keluarga yang menerima bantuan ini mencapai 5,1 juta manfaat. Semua warga miskin harus mendapatkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa jika ada Keluarga miskin yang tidak mendapatkan BLT Dana Desa. Bupati berpesan kepada KPK agar penyaluran BLT-DD berjalan sesuai mekanisme atau aturan terutama dalam pendataan warga agar penyalurannya tepat sasaran. Disebutkan bahwa untuk 100 Kampung Penerima BLT-DD dengan total 42,1 m lebih. Sementara itu dikatakan bahwa untuk 12 Kampung yang ada di Distrik Urei Faisei jumlah dana yang disalurkan 7,1 m lebih untuk 7 Kampung di Distrik Waropen (waropenkab.bps.go.id).

Bantuan khususnya di Kecamatan Urei Faisei Kampung Khemon Jaya ini baru dijalankan di saat adanya pandemi covid dan sebelumnya tidak dijalankan sama sekali. Jumlah keluarga yang ada di Kampung Khemon Jaya sebanyak 241 keluarga Dimana dalam hal Pemberian Bantuan Langsung Tunai ini baru di selenggarakan pada saat Pandemi dan Untuk Kampung Khemon Jaya sendiri memiliki Kebijakan dari Pengurus Kampung yaitu Pemberian Bantuan Langsung Tunai ini ditindaklanjuti kepada seluruh keluarga di Kampung Khemon Jaya untuk menerimanya dan dana yang di terima perbulan sebesar Rp 300.000., Kebijakan yang diambil pun tergantung dari jumlah dana di setiap Kampung yang berbeda dari jumlah dana yang tersedia (Dinas pemerintahan kampung/2021). Mengenai Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini juga merupakan program yang baru di selenggarakan semenjak adanya pandemi Covid-19 ini Khususnya di Kabupaten Waropen Kecamatan Urei Faisei dimana pada tahun sebelumnya pun terdapat program bantuan yang lainnya akan tetapi tidak berjalan dengan baik akibat terdapat beberapa kendala dalam proses penyaluran bantuan-bantuan tersebut.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Masalah dampak Covid-19 tersebut apabila dilihat dari perspektif mobilitas antara kota dengan desa maka dapat dikatakan bahwa masyarakat yang ada di perkotaan jauh lebih terdampak dibandingkan dengan masyarakat yang ada di pedesaan, hal ini didasarkan kepada realitas bahwa selama ini mobilitas penduduk yang ada atau tinggal di perkotaan jauh lebih tinggi dibanding dengan mobilitas penduduk yang ada di pedesaan (Purnomo, 2009). Mengenai Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini juga merupakan program yang baru di selenggarakan semenjak adanya pandemi Covid-19 ini Khususnya di Kabupaten Waropen Kecamatan Urei Faisei dimana pada tahun sebelumnya pun terdapat program bantuan yang lainnya akan tetapi tidak berjalan dengan baik akibat terdapat beberapa kendala dalam proses penyaluran bantuan-bantuan tersebut. Masalah yang terjadi terkait Penanganan Bantuan Langsung Tunai ini yaitu Rencana Pemberian Sumbangan di Kampung Khemon Jaya Kecamatan Urei Faisei Kabupaten Waropen yang pertama yaitu ada Kampung lain yang pembagian Bantuan Langsung Tunai mereka tidak di salurkan sesuai aturan yang ada atau yang memang harus di terima oleh masyarakat justru tidak diberikan.

Di media massa terakhir di infokan bahwa pembagian Bantuan Langsung Tunai ini dibagi untuk 4 bulan akan tetapi pada faktanya ada Kampung-kampung lain yang dikasih hanya 3 bulan atau bahkan ada yang 2 bulan saja dengan berbagai alasan yang diberikan seperti (uang yang 1bulannya) untuk keperluan Kampung Yang menjadi permasalahannya yaitu antara Kampung Khemon Jaya dan Kampung lainnya dimana melalui Kebijakan dari Kepala Kampung Khemon Jaya itu pemberian Bantuan Langsung Tunai nya diberikan kepala seluruh keluarga yang ada di Kampung Khemon Jaya tanpa terkecuali dimana dalam Aturannya orang yang menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang memenuhi kriteria untuk dapat menerima bantuan sedangkan dikampung sebelah ada yang memang seharusnya dapat akan tetapi mereka justru tidak mendapat sama sekali atau bisa jadi mereka dapat bantuan sosial lainnya .

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian ini menggunakan Jurnal oleh Para Peneliti diantaranya ada Hasbi Iqbal(Jurnal 2008), dengan Judul Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Tahun 2008 di Kabupaten Kudus diperuntukan bagi Rumah Tangga Sasaran dan menggunakan Metode Deskriptif Kualitatif. Adapun Dian Herdiana(Jurnal 2021) Dalam Judulnya mengenai Implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi

masyarakat terdampak Covid-19 di Kabupaten Sumedang untuk menjabarkan hal yang timbul dalam pengaktualan Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk mendeteksi isu dan tantangan biar sebagai bakal pembaruan dengan modus Deskriptif Kualitatif. Terdapat juga peneliti Siswanti(2008) Dinamika Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai di Kabupaten Kebumen, diperuntukan untuk Mengetahui perbedaan persepsi atau pemahaman dan kepentingan para aktor menggunakan metode Kualitatif melalui Wawancara. Dan yang berikut Cecelia Helenia Sasuwuk(Jurnal 2021) Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana desa pada masa pandemi di Desa Sea Kabupaten Minahasa untuk Mengetahui Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada masa pandemi dengan metode Kualitatif Deskriptif.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian terdahulu yakni lokus serta data primer dan sekunder yang didapatkan. Pada penelitian ini penulis menggunakan teori implementasi yang berbeda dari lima penelitian sebelumnya yaitu teori implementasi menurut George Edward III yang terdiri dari empat indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi kebijakan pemerintah dalam program bantuan langsung tunai dana desa di kecamatan urei fasei kabupaten waropen.

II. METODE

Penulisan Data ini Pengkaji memanfaatkan Pendekatan Kualitatif dengan teknik Analisis Deskriptif tertuju persoalan Kebijakan BLT- Dana Desa tahap pertama di kabupaten waropen. Menurut Moleong (2005:6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Kecamatan Urei Faisei

3.1. Komunikasi

Komunikasi menjadi variabel pertama yang mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu kebijakan, komunikasi bisa dikatakan menjadi hal utama dalam pelaksanaan kebijakan publik yang digunakan untuk memberikan informasi serta kejelasan dan tujuan yang pada suatu program.

Konsisten

Konsisten berkenaan atas kejelasan arahan yang patut dijalankan oleh pengelola supaya bisa mempengaruhi efektivitas pengaktualan, salah satu tatanan konsisten yakni keterikatan pemerintah untuk menyelenggarakan kebijakan.

Bersumber pada hasil tanya jawab yang dilakukan penulis dengan kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Waropen tanggal 8/01/2022 pukul 11.00 mengemukakan bahwa pemerintah ada kontrak untuk menyelenggarakan program pemda terkait program bantuan langsung tunai dana desa. Kepala kampung khemon jaya juga mengatakan bahwa, daftar nama penerima bantuan langsung tunai dana desa terus diperbaharui pada saat melakukan musdesus antara pemerintah kampung dan masyarakat sebelum pencairan bantuan langsung tunai dana desa tahap selanjutnya diberikan.

Adapun terdapat tumpang tindih data yang biasanya terjadi karena ada data yang diberikan pemerintah kampung kepada dinas sosial biasanya berbeda dengan data yang diberikan dinas sosial kepada kampung sehingga saat masyarakat yang ditetapkan menerima bantuan langsung tunai dana desa ternyata terdaftar di penerima bantuan sosial lain.

Dalam hal ini data yang di perlukan agar tidak terjadi kesalahan saat pembagian bantuan tersebut, apalagi disaat pandemi seperti ini banyak perhatian dari pemerintah salah satunya bantuan langsung tunai maupun bantuan sosial lainnya oleh sebab itu data yang di berikan pemerintah pusat kepada Dinas Sosial terkait daftar penerima bansos di kampung berbeda , membuat pendataan calon penerima manfaat terhambat.

Kejelasan

Hal berikut yang dapat di lihat berawal hubungan yakni kejelasan, mengenai kejelasan juga berhubungan menggunakan indikasi realisasi dan permintaan yang bisa dikomunikasikan. faktor yang mempengaruhi komunikasi kejelasan, kebijakan yang di transmisikan kepada para pelaksana kegiatan kebijakan maupun kelompok sasaran dari kebijakan tersebut, harus jelas sehingga diantara para pelaksana kebijakan tersebut harus jelas, sehingga diantara para pelaksana kebijakn mengetahui apa yang mereka maksud tujuan, sasaran serta substansi dari kebijakan publik tersebut. Komunikasi yang diperoleh para pengemban kebijaksanaan harus jelas supaya arah yang boleh di capai dapat terealisasi. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung kabupaten waropen telah melaksanakan tugas sebagai pengawas program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Kegiatan rutin yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yaitu dalam rangka memberi pembinaan pemerintah kampung untuk proses penyaluran bantuan langsung tunai dana desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Transmisi

Pengangkutan berhubungan pada pembagian maupun memindahkan penjelasan antar pengemban, sehingga tidak berlaku kesalahpahaman ikatan antara survei dengan si pembentuk aturan. Maksud dari transmisi yaitu bagaimana kebijakan ini ditransmisikan atau dikomunikasikan diantara sesama pelaksana kebijakan yang menyangkut media pemahaman pelaksana akan adanya kaitan antara keputusan yang telah ditetapkan, dengan aturan dalam pelaksanaan yang akan di terapkan sehingga dapat di implementasikan dengan baik agar tidak terjadi kesalahpahaman tentang keputusan yang dikeluarkan. aksi konferensi desa yang dilakukan di dusun membuat salah satu format pengangkutan penjelasan antara pemerintah dan desa. Aktivitas perhimpunan dilakukan guna tidak berlaku bertumpukan pemberian yang diberikan pada rakyat yang akan diberikan bantuan langsung tunai. Selain itu konferensi juga membagikan kebebasan kepada desa mengenai masyarakat siapa saja yang patut menerima bantuan langsung tunai.

3.2. Sumber Daya

Sumber daya yang dimaksud adalah kemampuan untuk mengelola segala hal dalam organisasi. Sumber daya adalah keahlian pribadi dalam organisasi, terdapat beberapa indikator sumber daya menurut Edward III yakni sumber daya manusia, sumber daya informasi, wewenang, dan fasilitas.

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia menggambarkan situasi yang menyimpang mempengaruhi kesuksesan praktik kebijaksanaan diperlukan spesialisasi individu yang paham pada aspeknya biar pengaktualan kewajiban bisa dilaksanakan bertimbang pada yang di ingin.

Sumber daya manusia yang mempengaruhi analitis penyelenggaraan bantuan langsung tunai dana desa di antaranya panitia pengurus bantuan langsung tunai dana desa atau tim relawan . relawan covid-19

membentuk populasi setempat yang bekerja untuk mencatat populasi yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan. Kepala kampung khemon jaya mengatakan bahwa, kampungnya telah membentuk Tim Relawan Covid-19, sekitar tanggal 19/08/2021. Kampung khemon jaya mecorakan individu yang telah berilmu di aspek pemerintahan dan mereka yang memahami apapun yang membutuhkan dukungan dari pemerintah. Berdasarkan penjelasan penulis mengingatkan bahwasannya SDM, yang mempengaruhi bantuan langsung tunai dana desa yakni relawan Covid-19

Sumber Daya Informasi

Informasi yang di miliki masyarakat mengenai bantuan langsung tunai dana desa, pengetahuan yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara Dalam hal ini masyarakat setempat mengatakan bahwasanya terkait bantuan langsung tunai dana desa ini, belum mendapatkan informasi dari perangkat kampung terkait proses penerima bantuan karena kurangnya aksi dari perangkat kampung kepada masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara penulis menyimpulkan bahwa ada kampung yang masih kurang melakukan diskusi terbuka dengan masyarakatnya. Masyarakat yang diwawancarai semuanya belum mengetahui informasi pasti mengenai bantuan langsung tunai baik dari alasan mengapa bantuan tidak di salurkan lagi. Dapat di simpulkan bahwa kampung tersebut masih kurang melakukan diskusi terbuka yang di wawancarai semuanya belum mengetahui informasi pasti mengenai bantuan langsung tunai dana desa.

Wewenang

Wewenang adalah salah satu indikator dari sumber daya yang menyatakan bahwa suatu kewenangan, harus bersifat formal alam perintah dan dapat di laksanakan dengan baik. Kewenangan merupakan otoritas bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen dalam melaksanakan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yaitu, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Waropen bertugas menyampaikan informasi kepada seluruh Pemerintah Kampung di Kabupaten Waropen untuk melaksanakan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, dan juga memberikan arahan mengenai mekanisme pendataan, dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Fasilitas

Fasilitas fisik juga merupakan salah satu faktor penting yang mendukung keberhasilan suatu kebijakan. Tanpa adanya fasilitas pendukung implementasi tidak akan berhasil. Menurut kepala kampung, fasilitas yang mendukung penyaluran bantuan langsung tunai adalah antara lain, kantor desa termpat berkumpulnya, kendaraan dinas yang digunakan pemerintah untuk mendukung terpenuhinya dokumen persyaratan untuk melakukan pendataan seperti ada di papan pengumuman, baliho dan lainnya.

3.3. Disposisi

Disposisi sikap merupakan pengemban kebijakan Edwards III menerangkan bahwasannya salah satu metode yang diarahkan buat menanggulangi kejadian kecondongan dengan menyalahgunakan, dengan kaidah ini dapat menjadi unsur pendorong yang mencetuskan pelaksana menjalankan tugas dengan baik. Disposisi ini berkaitan dengan suatu keinginan, kemauan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan, untuk melaksanakan serta mewujudkan kebijakan tersebut secara sungguh-sungguh, disposisi dalam hal ini terkait aspek pengangkatan Birokrat dan Insentif.

Pengangkatan Birokrat

Pengangkatan Birokrat juga sangat penting dalam kegiatan implementasi. Birokrat dibutuhkan terkait masalah hubungan antara aspek-aspek yang terlibat dalam suatu kegiatan. Mengenai pengangkatan Tim Relawan tugas yang bertugas melaksanakan pendataan calon penerima BLT- Dana Desa.

3.4. Struktur Birokrasi

Edwards III menyatakan bahwa ada dua karakteristik yang dapat mendorong kinerja organisasi kearah yang lebih baik adalah membuat standar operasional prosedur. Adapun hasil wawancara dengan kepala kampung khemon jaya pada tanggal 12/01/2022, prosedur penyaluran bantuan langsung tunai dana desa tetap pada prinsip dalam peraturan Menteri Keuangan yang dimana semua itu mengatur tentang bantuan langsung tunai.

Berdasarkan hasil studi dokumentasi pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai laporan kinerja yang menyatakan bahwa dalam proses penyaluran bantuan langsung tunai dana desa ini pemerintah di kabupaten waropen khususnya kecamatan urei fasei kampung khemon jaya menjalankan program bantuan langsung tunai ini dengan prinsip dan peraturan yang berlaku.

Bersumber pada penjelasan tercantum penulis beroleh kesimpulan bahwa standar operasional di lakukan oleh pemerintah, guna memaksimalkan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa. Maka, data yang di peroleh dari objek yang di teliti melalui hasil survey bahwa perlu diguankan prosedur dalam penyaluran bantuan langsung tunai dana desa. Adapun keterkaitan dengan teori evaluasi bahwasanya penaksiran terhadap pertumbuhan dan kemajuan dan nilai yang ditetapkan (Wrigstone, 1956).

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Implementasi kebijakan pemerintah dalam program bantuan langsung tunai dana desa di kecamatan urei fasei kabupaten waropen dilihat dari hasil penelitian di atas dengan menggunakan teori implementasi oleh Edward III dengan empat indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi secara umum sudah berjalan dengan baik meskipun masih ada yang perlu diperbaiki. Implementasi kebijakan pemerintah dalam program bantuan langsung tunai dana desa memberikan banyak dampak positif di berbagai lapisan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pandemic covid 19.

Penulis menemukan temuan penting yakni dalam pelaksanaan pemberian bantuan di berbagai daerah atau wilayah dengan cara yang berbeda sesuai kondisi di wilayah tersebut. Sama halnya dengan temuan Hasbi Iqbal (2008) bahwa dengan rencana bantuan untuk rumah tangga sasaran, dalam bentuk ganti rugi yang diterapkan di kabupaten kudas berjalan dengan baik dan lancar pelaksanaan lapangan berupa program dan pembuatan laporan.

Hasil Investigasi yang dilakukan oleh Balai Kampung Urei Fasei serta Peningkatan penjelasan mengenai Identifikasi Masalah Penyaluran dana menunjukkan bahwa pada dasarnya pasti banyak menopang dan mengsucceskan setiap agenda. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut, yang pertama objek yang di teliti yaitu sama-sama mengenai program bantuan langsung tunai dana desa, yang kedua jenis dan metode yang penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaan dalam penelitian sebelumnya adalah subjek dalam penelitian sebelumnya adalah fokus dalam penelitian sebelumnya yaitu fungsi program bantuan langsung tunai sedangkan pada penelitian ini fokus penelitiannya implementasi kebijakan program bantuan langsung tunai adapun lokasi dalam penelitian sebelumnya berbeda dengan lokasi penelitian ini.

Lembaga melakukan Pengkajian mengenai Penelitian yang dimana dalam Penerapan sumbangan menunjukkan bahwa, kerumitan akan menguasai Kebijakan Bantuan Langsung Tunai bahkan terhambat karena tidak tersedia pedoman umum tentang Program Bantuan Langsung Tunai. Setiap Kebijakan mengenai program, meminta adanya penerapannya. Tanpa Implementasi Program yang

tidak punya apa-apa, serta baiknya satu persiapan, namun penerapannya tidak keluar dari tujuan yang ingin dicapai.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Implementasi kebijakan pemerintah dalam program bantuan langsung tunai dana desa di kecamatan urei fasei kabupaten waropen. Untuk menemukan hasil yang lebih mendalam secara umum telah berlangsung secara baik dilihat dari hasil penulisan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III yang memuat empat indikator keberhasilan implementasi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu dinas saja sebagai model studi kasus yang dipilih karena waktu yang terbatas.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Implementasi kebijakan pemerintah dalam program bantuan langsung tunai dana desa di kecamatan urei fasei kabupaten waropen untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Waropen beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- A. Tarigan H, Akib. 2008. Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya. Jurnal . 1(8):1-19
- Departemen Sosial RI.(2008). Petunjuk Teknis Program Bantuan Langsung Tunai kepada Rumah Tangga Sasaran. Jakarta: Depsos RI.
- J, Lexy Moleong 2002, Metodologi penelitian Kualitatif, Penerbit Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Wahab, Abdul, 2002. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Malang UMM Press
- Winarno, Budi 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik, Yogyakarta : Medpress
- Wulan, Atika Ompi 2012. "Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi di Desa Pangu Kec. Ratahan Kab. Minahasa Tenggara)".